

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER PEMERIKSA PADA
KEGIATAN SELEKSI KESEHATAN CALON PRAJURIT

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Magister Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



Diajukan oleh
Abdul Rochman

NIM 10.93.0041



PERPUSTAKAAN

NO. INV : 231/S₂/MHK/C₁

TGL : 8/6 '12

PARAF : uf

Kepada
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2012

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER PEMERIKSA PADA
KEGIATAN SELEKSI KESEHATAN CALON PRAJURIT**

Diajukan oleh
Abdul Rochman
NIM 10.93.0041

Telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama

Dr. Endang Wahyati Y., SH, MH.

Tanggal.....

Pembimbing Pendamping

Samuel Hutabarat, SH, MH.

Tanggal.....

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER PEMERIKSA PADA
KEGIATAN SELEKSI KESEHATAN CALON PRAJURIT**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Abdul Rochman

NIM 10.93.0041

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal.....

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama

Anggota Tim Penguji Lain

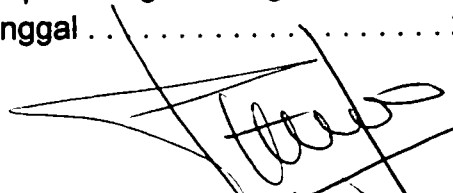
Dr. Endang Wahyati Y., SH, MH.

Dr. dr. Tri Wahyu, Sp.BTKV, MH.Kes

Pembimbing Pendamping

Samuel Hutabarat, SH, MH.

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum
Tanggal 2012



Prof. DR. Agnes Widanti S., SH., CN.
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, akhirnya tesis dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Dokter Pemeriksa Pada Kegiatan Seleksi Kesehatan Calon Prajurit" berhasil penulis selesaikan. Tesis yang penulis susun ini merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan untuk menyelesaikan program Pascasarjana di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Sepanjang pengalaman penulis sebagai dokter militer TNI AD yang sering ditunjuk menjadi dokter pemeriksa, sering mendapat permasalahan antara lain: pertama, dokter pemeriksa sering didesak oleh pihak-pihak tertentu untuk memberikan informasi hasil seleksi kesehatan yang bersifat rahasia. Kedua, calon prajurit meminta dokter untuk merubah hasil seleksi kesehatan (rekam medik) sambil menyodorkan hasil pemeriksaan kesehatan dari rumah sakit lain. Ketiga, calon meminta dokter melakukan tindakan medik atau pengobatan agar memenuhi syarat kesehatan.

Penulisan tesis ini dapat selesai berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada yth. Ibu Dr. Endang Wahyanti Y. SH, MH selaku pembimbing utama, kepada yth. Bpk. Samuel Hutabarat, SH, MH. sebagai pembimbing pendamping, dan kepada yth. Ibu Dr. dr Tri Wahyu Murni, Sp.BTKV, MH. Kes selaku penguji. Beliau-beliau telah memberi semangat, dorongan dan motivasi serta dengan penuh perhatian, telaten dan ikhlas menyediakan waktu untuk konsultasi dan pembimbingan penyusunan tesis ini. Beliau-beliau juga telah banyak memberikan masukan yang sangat berarti sehingga tulisan ini menjadi lebih tajam dan bermakna. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada: keluarga tercinta dan rekan-rekan seangkatan, atas segala dukungan, kerjasama dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan tepat waktu.

Akhirnya atas perhatian dan budi baik semua pihak, penulis hanya bisa kembalikan kepada Allah SWT, semoga semuanya mendapat balasan yang setimpal dari-Nya. Meski penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna sebagai suatu karya ilmiah, penulis tetap berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi tenaga kesehatan, institusi dan masyarakat. Amin.

Jakarta, Maret 2012

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Lembar Pernyataan	x
Abstrak	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG	1
B. PERUMUSAN PERMASALAHAN	5
C. TUJUAN PENELITIAN	5
D. MANFAAT PENULISAN	5
a. Bagi Peneliti	5
b. Bagi Institusi	6
c. Bagi Akademis	6
E. METODE PENELITIAN	6
a. Metode Pendekatan	6
b. Spesifikasi Penelitian	7
c. Jenis Data	7
d. Metode Pengumpulan Data	7
e. Metode Analisis Data	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. PERLINDUNGAN HUKUM	9
a. Pengertian Perlindungan Hukum	9
b. Macam-Macam Perlindungan Hukum	11
c. Bentuk Perlindungan Hukum	12
1. Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional	13
2. <i>Informed Consent</i>	13

3.	Rekam Medik	14
d.	Ruang Lingkup Perlindungan Hukum	15
1.	Institusi Pelayanan Kesehatan	15
2.	Tenaga Kesehatan	16
e.	Perlindungan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan	17
1.	Hukum Kesehatan	17
2.	Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan	21
B.	HUBUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM	22
a.	Pengertian Hubungan Hukum	22
b.	Dasar Hubungan Hukum	23
c.	Perbuatan Hukum	24
d.	Hubungan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan	25
1.	Hubungan Rumah Sakit dengan Pasien	26
2.	Hubungan Dokter dengan Pasien	27
3.	Hubungan Dokter dengan Pasien Asuransi	28
e.	Akibat Hukum dan Tanggung Jawab Hukum dalam Pelayanan Kesehatan	29
1.	Akibat Hukum dalam Pelayanan Kesehatan	29
2.	Tanggung Jawab Hukum dalam Pelayanan Kesehatan	30
C.	TES KESEHATAN DALAM SELEKSI CALON PRAJURIT	36
a.	Tes Kesehatan sebagai Bagian Seleksi	37
b.	Prosedur Kegiatan Tes Kesehatan	37
c.	Ruang Lingkup Upaya Pelayanan Kesehatan dalam Tes Kesehatan	39
d.	Tujuan Kegiatan Tes Kesehatan	40
e.	Tim Pelaksana Tes Kesehatan	40

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

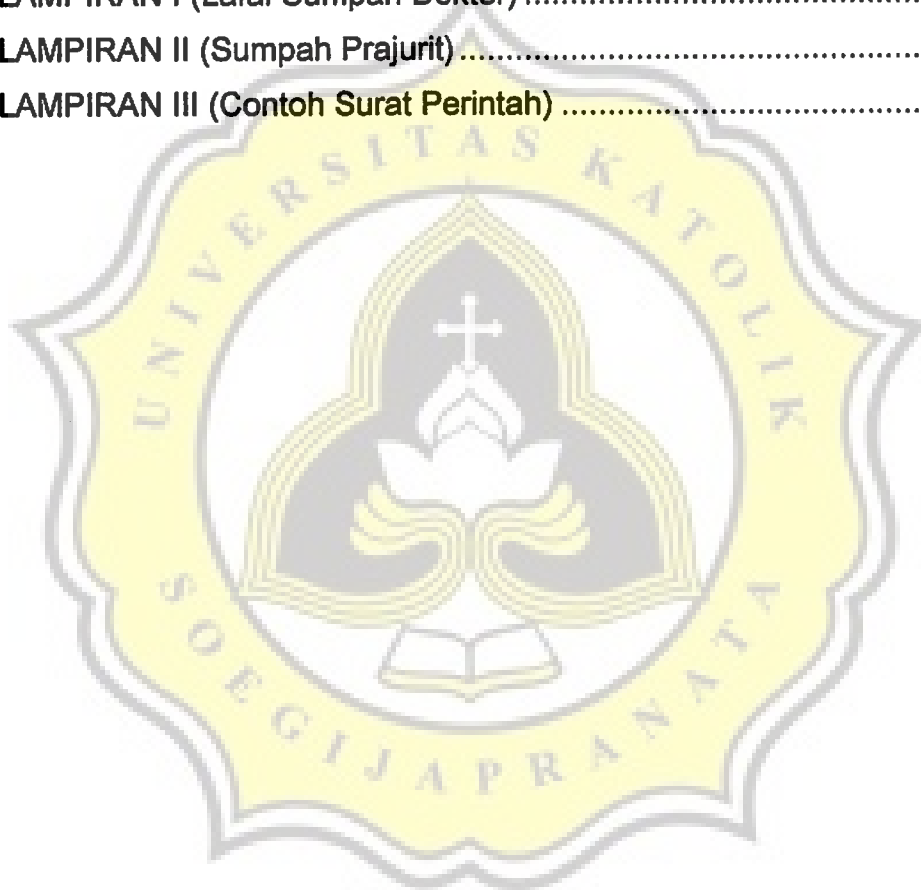
A. TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER PEMERIKSA DALAM KEGIATAN SELEKSI KESEHATAN PENERIMAAN PRAJURIT	42
a. Hubungan Hukum Dokter Pemeriksa dengan Calon Prajurit.....	43
1. Dasar Hukum Hubungan antara Dokter Pemeriksa dengan Calon Prajurit	43
2. Subyek Hukum dan Obyek Hukum dalam Seleksi Kesehatan	48
3. Ruang Lingkup Hubungan Hukum Seleksi Kesehatan	52
4. Akibat Hukum dalam Seleksi Kesehatan	53
b. Tanggung Jawab Hukum Dokter Pemeriksa dalam Seleksi Kesehatan	55
1. Tanggung Jawab Secara Perdata	55
2. Tanggung Jawab Secara Pidana	57
3. Tanggung Jawab Administrasi Negara	59
4. Dasar Hukum Tanggung Jawab Dokter Pemeriksa	61
B. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER PEMERIKSA DALAM KEGIATAN SELEKSI KESEHATAN PENERIMAAN PRAJURIT.....	62
a. Dasar Perlindungan Hukum bagi Dokter Pemeriksa	63
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	63
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)	63
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	63
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran	65
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	67

6.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI	69
7.	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer	70
8.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997	71
9.	Sumpah Dokter	72
10.	Sumpah Prajurit	72
b.	Subyek Hukum yang Dilindungi	73
1.	Pemerintah/Institusi Kesehatan yang Bertindak Sebagai Penyelenggara Kegiatan Seleksi dan Penyedia Sarana Pelayanan Kesehatan	73
2.	Tenaga Kesehatan	74
3.	Masyarakat atau Calon Prajurit	75
c.	Obyek Perlindungan Hukum	75
1.	Lingkup Obyek Hukum	75
2.	Masalah Hukum yang Mungkin Terjadi dalam Tes Kesehatan	75
d.	Prasyarat Perlindungan Hukum bagi Dokter Pemeriksa	79
e.	Bentuk Perlindungan Hukum bagi Dokter Pemeriksa	79
1.	Perlindungan Hukum dengan <i>Informed Consent</i>	80
2.	Perlindungan Hukum dengan Standar Prosedur Operasional	81
3.	Perlindungan Hukum dengan Rekam Medik	81
4.	Perlindungan Hukum dengan Surat Perintah	82

BAB IV PENUTUP

A.	KESIMPULAN	83
a.	Tanggung jawab Hukum Dokter Pemeriksa Dalam Kegiatan Seleksi Kesehatan Penerimaan Prajurit	84

b. Perlindungan Hukum bagi Dokter Pemeriksa dalam Tes Kesehatan	86
B. SARAN	88
DAFTAR PUSTAKA	89
DAFTAR LAMPIRAN	
LAMPIRAN I (Lafal Sumpah Dokter)	93
LAMPIRAN II (Sumpah Prajurit)	94
LAMPIRAN III (Contoh Surat Perintah)	95



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, Abdul Rochman, Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, NIM 10.93.0041, menyatakan:

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Maret 2012

Abdul Rochman

ABSTRAK

Setiap tahun Tentara Nasional Indonesia (TNI), membuka pendaftaran bagi masyarakat umum untuk diterima menjadi prajurit sukarela. Dalam proses penerimaan prajurit tersebut para pendaftar (calon prajurit) harus menjalani serangkaian seleksi diantaranya seleksi kesehatan. Seleksi kesehatan meliputi: pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan penunjang yang diperlukan. Permasalahan yang sering terjadi dalam proses seleksi antara lain: dokter didesak oleh pihak tertentu untuk memberikan informasi hasil seleksi kesehatan padahal informasi tersebut bersifat rahasia. Masalah lain, calon menyodorkan hasil pemeriksaan rumah sakit lain dan meminta dokter untuk merubah rekam medik, atau meminta dokter melakukan tindakan medik atau pengobatan agar calon bisa memenuhi syarat kesehatan.

Penelitian hukum ini menggunakan metoda yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Analisis dititikberatkan pada data sekunder dari kepustakaan yang dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang aspek hukum dari kegiatan pemeriksaan kesehatan dalam seleksi penerimaan prajurit sukarela. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang tanggung jawab hukum dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi dokter pemeriksa.

Seleksi kesehatan penerimaan prajurit melibatkan masyarakat/calon prajurit dan pemerintah yang diwakili oleh institusi Kesehatan Angkatan Darat, yang membentuk kepanitiaan untuk pemeriksaan kesehatan yang terdiri dari dokter pemeriksa dibantu tenaga kesehatan lain. Dalam kegiatan seleksi kesehatan calon akan bertemu dokter yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan sehingga terjadi hubungan hukum. Sebagai akibat dari hubungan hukum timbul hak dan kewajiban baik dari pihak dokter maupun pihak calon. Terkait dengan kewajiban dokter yang timbul sebagai akibat hukum, bila terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaannya maka timbul tanggung jawab hukum dokter. Selanjutnya untuk memberi kepastian hukum terhadap hak dokter, maka diperlukan perlindungan hukum.

Kata kunci: dokter, seleksi kesehatan, tanggung jawab, perlindungan hukum.

ABSTRACT

Every year the Indonesian military (TNI), open recruitment for public to be admitted to a voluntary soldier. The applicant (the candidates) must undergo a series of selection in the soldier admissions process. One of those selection is health selection. Selection of health include: health and support screening that needed. Problems that often occur in the selection process include: doctors urged by certain parties to inform the result of health selection when the information is confidential. Another problem, the candidate not only offering the result from another hospital and ask the doctor to alter his medical records, but also ask the doctor to give medical action or treatment so that candidates can meet the health requirements.

This research using a normative juridical methods by observing library materials or secondary data. Point of analysis is secondary data from the literature which were analyzed in a qualitative way to get a clear picture about the legal aspects of health screening activities in the selection of the voluntary soldiers. This research aimed to get picture about law responsibility and know protection in law for the doctor who does examination.

Health selection of acceptance soldier involving public/soldier candidates and the government represented by the Army Health institutions, which form a committee for medical examination which consists of examining physician assisted other health professionals. In the selection of candidates will meet medical doctor who will perform health checks resulting in a legal relationship. As a result of the legal relationship of rights and obligations arising from both the physician and the candidate. Associated with physician liability arising as a result of the law, in the event of errors or omissions arising in the implementation of the doctor's legal responsibility. Furthermore, to provide legal certainty for the right doctor, the necessary legal protection.

Keywords: doctor, health selection, responsibility, legal protection.